

STUDI DESKRIPTIF TENTANG POLA RELASI HARMONI ANTAR AKTOR DALAM  
FORMULASI KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DI  
KABUPATEN JOMBANG

Setyo Elok Wahyuni

**KKB KK-2 TKP 17/10 Wah s**

Dr. Falih Suaedi, Drs, Msi

**2010**

**ABSTRACT**

This research was conducted to determine the policy formulation process direct budget allocation in Jombang that became the main driving force in regional development to solve various socio-economic welfare of the community with the ultimate goal. The research method used in this thesis is the type of descriptive research are reviewed qualitatively. Research approach used is the *empirico-inductive* approach. The primary data obtained from interviews, documents and statements of the descriptive comments informant on different occasions as well as related news. Secondary data obtained from literatures and other documents in the form of writing in newspapers or magazines that have been or are not yet published. Also, another the research results who have a strong correlation with the substance of the research, including any documents in the Local Government of Jombang that have relevance to the focus of research. From the data and empirical evidence, identified four actors/stakeholders and interests that influence policy formulation of the direct budget allocations. The pattern of political relations of harmony placing each actors/stakeholders in a balanced dominance to understand each other, keeping harmony and avoiding conflict but does not occur the collective corruption. Pattern of harmonic relationships are not supported with strong checks and balances has led to the interests and hegemony are taken of each actor/stakeholder reduce the aim regional autonomy for the welfare of society.

*Keywords: Policy Formulation, Kabupaten Jombang, Actors Harmonization.*

## RINGKASAN

Penyimpangan tujuan otonomi daerah sebenarnya bisa dihambat apabila terjadi pola relasi harmoni yang didukung dengan *checks and balances* yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Dengan pola relasi demikian, terbentuk sebuah hubungan postif antara eksekutif dan legislatif yang kritis dan saling menjaga tercapainya tujuan otonomi daerah dari perilaku oportunistik beberapa stakeholders atau pengaruh-pengaruh negatif lainnya. Tesis ini meneliti bagaimana pola relasi harmoni antar aktor dalam formulasi kebijakan alokasi anggaran belanja langsung di Kabupaten Jombang. Tujuan akhir dari penelitian di tesis ini adalah untuk mencari solusi dan alternatif tindakan atas berbagai masalah pembangunan daerah yang hingga kini belum dapat dipecahkan yang mungkin disebabkan oleh pengaruh negatif input berupa kekuasaan/kewenangan, kepentingan dan hegemoni yang dibawa masing-masing aktor/stakeholders yang terlibat dalam formulasi alokasi anggaran belanja langsung, sehingga tujuan otonomi daerah dalam mensejahterakan dan meningkatkan daya saing masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif yang dikaji secara kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah empiris-induktif. Fokus penelitian memberi titik tekan pada Analisis Proses Formulasi Kebijakan dalam Sebuah Sistem Politik dan Analisis Dimensi Politik dan Kekuasaan dalam Proses Formulasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, data primer yang terdiri dari pengalaman, pemahaman dan pengetahuan informan atau narasumber yang mewakili informasi bukan responden yang mewakili populasi. Sumber data kedua adalah data sekunder yang terdiri dari literatur dan dokumen lain, baik berupa tulisan yang dimuat di surat kabar atau majalah yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Juga, hasil penelitian orang lain yang mempunyai korelasi erat dengan substansi penelitian, termasuk dokumen yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Dari data dan bukti empirik yang disajikan pada bab hasil dan analisis penelitian, teridentifikasi empat stakeholders dan kepentingannya yang mempengaruhi formulasi kebijakan alokasi anggaran belanja langsung di Kabupaten Jombang. Stakeholders dan kepentingan yang dimaksud adalah: pertama, Bupati yang memiliki kepentingan menjalankan kebijakan yang populis untuk kepentingan *pork barrel*. Stakeholders yang kedua adalah DPRD yang memiliki kepentingan memperbesar PAD, mendapat fasilitas kedinasan, menjaga bisnis pribadi atau keluarga dan memperoleh plafond anggaran untuk menjaga dukungan konstituennya. Sementara, stakeholders ketiga adalah Birokrasi yang memiliki kepentingan maksimalisasi struktur dan jumlah anggaran dengan tujuan *lucrative opportunities*. Terakhir, stakeholders ke-empat adalah pengusaha. Pengusaha tergolong *outside stakeholders* yang memiliki kepentingan menguasai sumber finansial dengan cara memenangkan tender proyek-proyek yang sumber dananya berasal dari APBD.

